

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

**2013**

**PERDA KABUPATEN SINTANG NO.1, LD.2013/NO.1 SETDA KABUPATEN SINTANG : 8 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

**ABSTRAK**

- :
- Bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, maka pemerintah Kabupaten Sintang perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, sehingga perlu dibentuk peraturan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945, UU No.27 Thn 1959, UU No.28 Thn 1999, UU No.31 Thn 1999, UU No 17 Thn 2003, UU No.1 Thn 2004, UU No.15 Thn 2004, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, UU No. 40 Thn 2007, UU No.12 Thn 2011, PP No.58 Thn 2005, PP No.79 Thn 2005, PP No.38 Thn 2007, PP No.41 Thn 2007, PP no.1 Thn 2008, PP No.71 Thn 2010, Permendagri No.52 Thn 2012, Perda Prov KalBar No.1 Thn 1999, Perda Kab. Sintang No.25 Thn 2006, Perda kab. Sintang No.1 Thn 2008, Perda kab.Sintang No.2 Thn 2008, Perda kab.Sintang No. 12 Thn 2010, Perda kab.Sintang No. 10 Thn 2012.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat seluruhnya sampai dengan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 19.997.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan jumlah lembar saham 19.997 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) lembar. Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2013 dalam bentuk pembelian saham dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan jumlah lembar saham 3.000 (tiga ribu) lembar. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan penyesuaian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

**Catatan**

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2013.
  - Penjelasan 3 hlm.

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG**

**2013**

**PERDA KABUPATEN SINTANG NO.2, LD.2013/NO.1 SETDA KABUPATEN SINTANG: 10 HLM**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG**

**ABSTRAK**

- :
- Bahwa PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum dengan modal usaha berasal dari Pemerintah Kabupaten Sintang, sehingga Pemerintah Kabupaten Sintang perlu membentuk peraturan Daerah tentang penambahan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945, UU No.27 Thn 1959, UU No.28 Thn 1999, UU No.31 Thn 1999, UU No 17 Thn 2003, UU No.1 Thn 2004, UU No.7 Thn 2004, UU No.15 Thn 2004, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, UU No.12 Thn 2011, UU No.16 Thn 2005, PP No.58 Thn 2005, PP No.79 Thn 2005, PP No.38 Thn 2007, PP No.41 Thn 2007, PP no.1 Thn 2008, PP No.71 Thn 2010, Perpres No.54 Thn 2010, Permendagri No.52 Thn 2012, Perda Kab. Sintang No.25 Thn 2006, Perda Kab. Sintang No.25 Thn 2006, Perda kab. Sintang No.1 Thn 2008, Perda kab.Sintang No.2 Thn 2008, Perda Kab. Sintang No.9 Thn 2008, Perda Kab. Sintang No.10 Thn 2008, Perda kab.Sintang No. 2 Thn 2012.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang berupa dana dan aset yang dinilai dengan uang sampai dengan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 48.233.674.615,- (empat puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah). Penyertaan modal berupa dana sampai dengan Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 19.396.061.075,- (sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah), dan penyertaan modal berupa aset tetap penunjang operasional yang telah diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 28.837.613.540,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh rupiah).

**Catatan**

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2013.
  - Penjelasan 3 hlm.

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**2013**

**PERDA KABUPATEN SINTANG NO.3, LD.2013/NO.1 SETDA KABUPATEN SINTANG: 38 HLM**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**ABSTRAK**

- : – Bahwa bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945, UU No.27 Thn 1959, UU No.28 Thn 1999, UU No.31 Thn 1999, UU No 17 Thn 2003, UU No.1 Thn 2004, UU No.15 Thn 2004, UU No.25 Thn 2004, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, UU No.28 Thn 2009, UU No.12 Thn 2011, PP No. 24 Thn 2004, PP No.23 Thn 2005, PP No.55 Thn 2005, PP No.58 Thn 2005, PP No.65 Thn 2005, PP No.79 Thn 2005, PP No. 6 Thn 2006, PP No. 8 Thn 2006, PP No.38 Thn 2007, PP No.41 Thn 2007, PP No.71 Thn 2010, PP no.91 Thn 2010, Perpres No.54 Thn 2010, Permendagri No.52 Thn 2012, Permendagri No.13 Thn 2006, Permendagri No.17 Thn 2007, Perda kab. Sintang No.1 Thn 2008, Perda kab.Sintang No.2 Thn 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 46 diubah, di antara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3a dan angka 3b, angka 8 dihapus, di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 13a, di antara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 17a, di antara angka 21 dan angka 22 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 21a, di antara angka 22 dan angka 23 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 22a, di antara angka 43 dan angka 44 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 43a, di antara angka 44 dan angka 45 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 44a, di antara angka 47 dan angka 48 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 47a, angka 47b, angka 47c, dan angka 47d, di antara angka 48 dan angka 49 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 48a, angka 48b, angka 48c, dan angka 48d, dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 65 dan angka 66.

**Catatan**

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2013.
- Penjelasan 17 hlm.

## **PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**2013**

**PERDA KABUPATEN SINTANG NO.4, LD.2013/NO.4 SETDA KABUPATEN SINTANG: 23 HLM**

## **PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

### **ABSTRAK**

- : – Bahwa dalam upaya meningkatkan kontribusi orang atau badan yang mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan selain kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan, perlu ditetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945, UU No.27 Thn 1959, UU No.5 Thn 1960, UU No.8 Thn 1981, UU No.6 thn 1983, UU No.16 Thn 1985, UU No.19 Thn 1997, UU No.28 Thn 1999, UU No.31 Thn 1999, UU No.14 Thn 2002, UU No. 17 Thn 2003, UU No.1 Thn 2004, UU No.15 Thn 2004, UU No.30 Thn 2004, UU No. 32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, UU No. 28 Thn 2009, UU No.12 Thn 2011, PP No. 27 Thn 1983, PP No.40 Thn 1996, PP No.24 Thn 1997, PP No.37 Thn 1998, PP No.55 Thn 2005, PP No.58 Thn 2005, PP No.79 Thn 2005, PP No. 8 Thn 2006, PP No.38 Thn 2007, PP no.41 Thn 2007, PP No.69 Thn 2010, PP No.91 Thn 2010, Permendagri No.13 Thn 2006, Permenkeu No.148/PMK.07/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Tahun Pajak Dan Saat Pajak Terutang, Pendataan Dan Penetapan, Pemungutan Pajak, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Kedaluwarsa Pajak, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Ketentuan Pidana Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian.

### **Catatan**

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2013.
- Penjelasan 14 hlm

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG**

**2013**

**PERDA KABUPATEN SINTANG NO.5, LD.2013/NO.5 SETDA KABUPATEN SINTANG: 9 HLM**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG**

**ABSTRAK**

- :
- Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a di atas, dan guna meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pelayanan publik, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 27 Thn 1959, UU No. 8 Thn 1974, UU No. 28 Thn 1999, UU No. 17 Thn 2003, UU No. 1 Thn 2004, UU No. 15 Thn 2004, UU No. 32 Thn 2004, UU No. 33 Thn 2004, UU No.3 Thn 2005, UU No.16 Thn 2006, UU No. 28 Thn 2009, UU No. 12 Thn 2011,PP No.9 Thn 2003, PP No. 58 Thn 2005, PP No. 79 Thn 2005, PP No. 73 Thn 2005, PP No. 6 Thn 2006, PP No.8 Thn 2006, PP No. 16 Thn 2007, PP No. 38 Thn 2007, PP No. 41 Thn 2007, PP No. 19 Thn 2008, PP No. 6 Thn 2010, Perda kab. Sintang No. 1 Thn 2008, Perda kab.Sintang No. 2 Thn 2008, Perda Kab. Sintang No. 4 Thn 2011.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) mengalami perubahan.

**Catatan**

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2013.
  - Penjelasan 3 hlm.